



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD YASIR NASUTION
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 419446

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.870.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/273 m2 di KAB / KOTA KOTA BINJAI , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah Seluas 6.400 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, Rp. 270.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BINJAI , Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	115.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS / AGIYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	63.400.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.073.400.000
III. HUTANG	Rp.	245.775.627
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.827.624.373

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.